

**PENGARUH TEKANAN, KESEMPATAN DAN RASIONALISASI
TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN (*FRAUD*)
(Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru)**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:
AMI ZAHARA
2013/1303471

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

**PENGARUH TEKANAN, KESEMPATAN DAN RASIONALISASI
TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN (*FRAUD*)
(Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kota Pekanbaru)**

Oleh :

Ami Zahara
1303471/2013

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 109
September 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 7 Agustus 2017

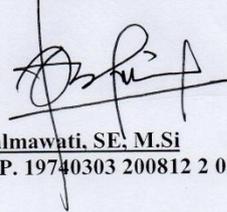
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Efrizal Svofvan, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19580519 19901 1 001

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

**PENGARUH TEKANAN, KESEMPATAN DAN RASIONALISASI TERHADAP
TINDAKAN KECURANGAN (*FRAUD*)
(Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru)**

Ami Zahara

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

email: amizahara23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), (2) pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), (3) pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), pada narapidana tipikor yang ada di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru. Jenis Penelitian ini adalah kausatif. Populasi pada penelitian ini adalah narapidana tipikor yang ada di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru yang berjumlah 66 orang. Penelitian ini menggunakan Teknik *Total Sampling* untuk mendapatkan sampel sehingga semua populasi yang berjumlah 66 orang dijadikan sampel seluruhnya. Sumber data adalah data primer. Metode Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi berganda, tindakan kecurangan (*fraud*) sebagai variabel terikat dan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai variabel bebas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) tekanan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,523 < 1,672$ (sig $0,113 > 0,05$) sehingga hipotesis 1 ditolak, (2) kesempatan berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,053 > 1,672$ (sig $0,003 < 0,05$) sehingga hipotesis 2 diterima, dan (3) rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,075 > 1,672$ (sig $0,003 < 0,05$) sehingga hipotesis 3 diterima.

Kata Kunci: Tindakan Kecurangan (*Fraud*), Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi.

ABSTRACT

This study aims to examine: (1) the effect of pressure on fraud, (2) the effect of opportunity on fraud, (3) the effect of rationalization on fraud in the corrupt prisoners in prisons of Class II A of Pekanbaru city. This type of research is causative. The population in this study is the corruption inmates who exist in prisons Class II A Pekanbaru City which requires 66 people. This study uses the Total Sampling Technique for the sample as much as all the population owned 66 people sampled. The data source is the primary data. Methods Data collection using questionnaires. Data analysis using multiple regression. The fraud as dependent variable and pressure, opportunity, and rationalization as independent variables. This research concludes: (1) the pressure is not significant to fraud, where $t_{count} < t_{table}$ is $1,523 < 1,672$ (sig $0,113 > 0,05$) so that hypothesis 1 is rejected, (2) opportunity has a positive influence to fraud, Where $t_{count} > t_{table}$ is $3,053 > 1,672$ (sig $0,003 < 0,05$) so that hypothesis 2 is accepted, and (3) and rationalization has a positive influence to fraud, where $t_{count} > t_{table}$ is $3,075 > 1,672$ Sig $0,003 < 0,05$) so that hypothesis 3 is accepted.

Keywords: *Fraud, Pressure, Opportunity, Rationalization.*

1. PENDAHULUAN

Fraud merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan organisasi *anti-fraud* terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan *anti-fraud*. ACFE mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaihan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Zimbelman dkk, 2014:7).

ACFE mengklasifikasikan kecurangan itu ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) kecurangan aset (*asset misappropriation*), berupa pencurian atau penyalahgunaan aset; (2) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan; (3) korupsi (*corruption*), yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain. Jenis kecurangan ini banyak terjadi di sektor pemerintahan. Kecurangan dalam bentuk korupsi ini sulit untuk dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang yang

berkerjasama dalam melakukan kecurangan tersebut.

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu: pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Jenis kecurangan (*fraud*) yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, hal ini karena praktek *fraud* antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Di negara maju di mana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi masyarakat secara umum sudah cukup mantap maka praktek fraud lebih sedikit modus operasinya.

Menurut Wilopo (2006), pada umumnya kecurangan berkaitan dengan korupsi. Hal ini juga didukung dengan studi Shleifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) dalam Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kecurangan suatu negara ditunjukkan oleh tingkat korupsi dari negara tersebut. Karena itulah untuk mengukur tingkat kecurangan disuatu negara dilakukan penghitungan indeks korupsinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan wawasan yang sangat berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa kecurangan terjadi. Kebanyakan orang lebih mengenal istilah “**korupsi**” (*corruption*) dibandingkan “**kecurangan**” (*fraud*). Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Hasil penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Cressey melakukan wawancara kepada para pelaku kecurangan yang telah menyandang

status sebagai narapidana. Ia mewawancarai sekitar 200 narapidana yang berada di penjara. Salah satu kesimpulan pokok yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah setiap terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal: (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melakukan kejahatan dan (3) rasionalisasi/pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan).

Secara harfiah korupsi (bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok) adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Tindak perilaku kecurangan korupsi akhir-akhir ini semakin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak. Tindak kecurangan dalam bentuk korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak kecurangan korupsi.

Lembaga-lembaga anti korupsi juga muncul baik yang dibentuk oleh pemerintah (KPK, BPK, dan BPKP) maupun oleh pihak swasta yang independen (ICW, *Transparency International*, dan lain-lain). Tindakan kecurangan korupsi pada pemerintahan yang menjadi bagian dari *fraud* dalam akuntansi, merupakan tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya keuangan demi memberi keuntungan pribadi dan kelompok.

Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Basri dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di gedung KPK, Jakarta (9 Desember 2011) menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan lima tahun terakhir, ada 318 temuan yang mengandung unsur korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 29,5 triliun dan 450 juta dollar. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, di pemerintah daerah pun seakan turut serta dalam menyumbang sebagian kerugian negara.

Banyaknya kasus kecurangan korupsi di negara kita telah mendapat apresiasi yang tinggi dari lembaga internasional yaitu *Transparency International* (TI) yang merupakan sebuah institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman). Setiap tahun *Transparency International* (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI). Tujuan peluncuran CPI setiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Indonesia termasuk dalam peringkat yang paling tinggi dalam hal urusan korupsi. Sebuah prestasi yang sangat memalukan sebagai negara yang mempunyai nilai religius yang tinggi.

Terjadinya perbuatan korupsi dalam suatu negara adalah karena lemahnya sistem. Sistem maksudnya disini adalah sistem mengenai pencegahan korupsi itu sendiri. Berdasarkan indeks persepsi korupsi, Indonesia masih masuk ke dalam jajaran negara-negara terkorup.

Di Provinsi Riau, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan salah satu tempat ditahan dan dibinanya pelaku tindak pidana korupsi.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Korupsi Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah
2011	10
2012	41
2013	63
2014	65
2015	71
2016	78
2017	66

Sumber: smlap.ditjenpas.go.id

Berdasarkan data narapidana tipikor di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011-2016 pelaku pidana korupsi meningkat meskipun pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan di Lapas Kelas II A Pekanbaru, namun Provinsi Riau masih tetap masuk kedalam 10 besar Provinsi terkorup di Indonesia menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*), ICW merupakan lembaga swasta yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk berpartisipasi aktif melakukan perlawanan korupsi. Hasil survei ICW tahun 2016 menyatakan bahwa Provinsi Riau terdapat pada urutan ke-enam setelah Jawa Tengah dengan jumlah 196 narapidana tipikor. Tetapi, ICW menegaskan bahwa pemantauan ini tidak berarti Provinsi Riau sebagai daerah paling korup di Indonesia. Sebaliknya,

data ini menggambarkan aparat penegak hukum banyak bertindak di daerah tersebut. Hingga April 2016, sudah 25 pejabat pemerintahan dan politisi di Riau dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain gaya hidup mewah, ternyata minimnya pejabat birokrasi Pemerintah Daerah di Provinsi Riau untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan maupun institusi terkait lainnya, juga menjadi pemicu korupsi merajalela di Bumi Melayu ini. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, faktor ini alasan atau faktor paling kuat mengapa kasus korupsi terus berulang di Riau sejak beberapa periode kepemimpinan berganti. Menurut Saut, Riau menjadi sorotan KPK karena tiga gubernurnya dalam tiga periode berturut-turut terjerat kasus korupsi. Mereka ialah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun. Ketiganya ditahan KPK dengan kasus yang berbeda (antikorupsi.org/diakses, 4 Maret 2017).

Di antara narapidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, beberapa di antaranya terdapat pejabat Pemprov Riau yaitu mantan Gubernur Riau, Rusli Zinal atas kasus korupsi PON Riau 2012 dan izin kehutanan dengan vonis hukuman 14 tahun penjara, Rusli juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, Senin (17 November 2014). Dia terbukti melakukan korupsi bersama-sama dalam kasus PON dengan memberi uang kepada sejumlah anggota DPR sebesar Rp 900 juta. Dia juga menerima uang Rp 500 juta dari kontraktor pembangunan *venue* PON, dan terbukti menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan izin kehutanan terhadap sembilan perusahaan yang merugikan negara senilai Rp 265 miliar. Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru

menjatuhkan vonis 14 tahun. Rusli lalu banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan dikurangi hukumannya menjadi 10 tahun. Namun, saat kasasi di Mahkamah Agung, Hakim Agung Artidjo Alkostar, mengembalikan vonis ke Rusli Zainal menjadi 14 tahun (news.detik.com/diakses, 4 Maret 2017).

Salah satu upaya untuk pengendalian dan pencegahan korupsi adalah dengan mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan korupsi. Dengan mengetahui sebabnya, maka dapat kita buat langkah pengendalian dan pencegahan dari tindakan tersebut.

Dellaportas (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa, sebuah khas kejahatan kerah putih adalah kurangnya perasaan atau ketidakpedulian oleh pelaku yang berasal dari serangkaian alasan atau rasionalisasi untuk membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku menyimpang (Anand, Blake, & Joshi, 2004; Benson, 1985; Duffield & Grabosky, 2001; Rossouw et al., 2000). Dalam hal ini bagian dari fraud triangle, pelaku mengakui kesalahan tetapi menyangkal bahwa itu salah, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan citra diri non-menyimpang sementara terus terlibat dalam kegiatan kriminal (Benson, 1985; Coleman, 1987; Willoperasi, Griffin, & Torrance, 2001).

Hasil penelitian Dahlia, dkk (2013) menunjukkan rasionalisasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koruptor melakukan tindak kecurangannya bukan karena adanya tekanan ekonomi ataupun kesempatan melainkan pada umumnya para koruptor menganggap apa yang dilakukannya adalah hal yang umum

yang biasa dilakukan dan tidak melanggar hukum dan kemanusiaan sehingga tindak korupsi kerap terjadi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2015) di mana dalam penelitiannya menganalisis dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi di sektor publik di negara Nigeria untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan, dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan dan rasionalisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di negara Nigeria.

Penelitian ini sangat menarik dan penting untuk dilakukan dalam hal mencari faktor-faktor penyebab seseorang/sekelompok orang melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk korupsi, karena dilihat begitu banyaknya kasus kecurangan korupsi yang terjadi di negara Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Dengan diketahuinya penyebab mengapa korupsi terjadi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah atau organisasi lain untuk dapat membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud)”**. Penulis akan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Kecurangan

Secara harfiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang

luas. Black's Law Dictionary menguraikan pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Sedangkan dalam Arens (2008:430) kecurangan didefinisikan sebagai Setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau pihak lain. ACFE mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan yang sama (*uniform occupational fraud classification system*) membagi *fraud* menjadi 3 jenis sebagai berikut :

- 1) Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)
- 2) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)
- 3) Korupsi (*Corruption*)

2.2. Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan

hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20).

Berdasarkan *Fraud Tree* yang ada di dalam Tuanakotta (2012:197), korupsi terbagi menjadi:

1. *Conflict of Interest*
2. *Bribery*
3. *Illegal Gratuities*
4. *Economic Extortion*

2.3 Fraud Triangle

Fraud Triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950 setelah melakukan penelitian untuk tesis doktornya. Cressey mengungkapkan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan penyebab seseorang melakukan *fraud*.

Berdasarkan penelitian yang telah Cressey lakukan, ia menemukan bahwa seseorang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki *non-sharable problems*. Mereka yakin masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan

jabatan/pekerjaan yang mereka miliki saat ini dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang asset menjadi seseorang yang dapat menggunakan asset yang telah dipercayakan secara pribadi. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang illegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar.

Berdasarkan paparan diatas, Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu tekanan masalah keuangan maupun melakukan pekerjaan yang erat kaitannya untuk mencapai target (*pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud* dan rasionalisasi dari pelaku.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih dalam Sugiyono (2008:11). Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah narapidana tindak pidana korupsi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru yang berjumlah 66 orang (smlap.ditjenpas.go.id).

Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Total Sampling, yakni menjadikan seluruh

populasi sebagai sampel karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 subjek. Jadi, sampel penelitian ini adalah seluruh narapidana tindak pidana korupsi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek yang merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Di mana subjek penelitian ini adalah seluruh narapidana tindak pidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut langsung diperoleh dari narapidana tindak pidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket (kuesioner).

3.5 Variabel Penelitian

a. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah tindakan kecurangan (*fraud*).

b. Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah:

- a). Tekanan (X1)
- b). Kesempatan (X2)
- c). Rasionalisasi (X3)

3.6 Instrumen Penelitian

Tabel 2. Instrumen Penelitian

VARIABLE	INDIKATOR	NO ITEM
Tekanan (X_1) Stevan Dellaportas 2012	a. Tekanan keuangan	1,2,3,4,5
	b. Kebiasaan buruk	6,7,8,9
	c. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan	10,11,12
Kesempatan (X_2) Tuanakotta, 2007	a. Memanfaatkan masa jabatan	13
	b. Menduduki suatu posisi cukup lama	14
	c. Pengendalian internal lemah	15
	d. Pengendalian eksternal	16
	e. Aturan yang tidak tegas	17
Rasionalisasi (X_3) Stevan Dellaportas 2012, Suradi 2012	a. Sikap manajemen terhadap nilai etis rendah	18
	b. Penyelewengan merupakan hal yang lumrah	19
	c. Hasil penyelewengan digunakan untuk tujuan kebaikan	20
	d. Layak mendapatkan imbalan lebih karena hasil yang di dapat tidak sesuai	21
Tindakan Kecura	a. <i>Bribery</i>	22,23
	b. <i>Conflict of Interest</i>	24

ngan (<i>Fraud</i>) (Y) Tuanakotta 2007; Dahlia, dkk 2013	c. <i>Illegal Gratuities</i>	25
	d. <i>Economic Extortion</i>	26

3.7 Model Penelitian

Pengujian atas hipotesis penelitian menggunakan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

a = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Tekanan

X_2 = Kesempatan

X_3 = Rasionalisasi

e = *error term*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (**Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis**), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan

ekonomi Sumatera yg terus berkembang. Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*Penjara*”, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda) dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m² dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau.

Adapun kapasitas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru sebanyak 771 orang, terdiri dari 8 blok hunian. Saat ini Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kota Pekanbaru sudah mengalami kelebihan kapasitas. Berdasarkan data yang diperoleh per tanggal 22 Juli 2017 dari sms.ditjenpas.go.id, jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru sudah mencapai 1228 orang.

2. Sumber Daya Manusia

Saat ini jumlah pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kota Pekanbaru berjumlah 96 orang, yang terdiri dari:

Tabel 3. Sumber Daya Manusia Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.

No	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1.	Magister (S2)	4
2.	Sarjana 1 (S1)	14
3.	Diploma 3 (D3)	8
4.	SMA/Sederajat	68
5.	SMP/Sederajat	2

Sumber: ditjenpas.go.id

3. Data Responden

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 66 orang Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) karena jumlahnya tidak melebihi dari 100 subjek.

Dari 66 kuesioner yang dibagikan, 66 kuesioner yang kembali, dan 6 kuesioner yang tidak dapat diolah karena responden tidak mengisi kuesioner tersebut secara lengkap. Gambaran penyebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Pengembalian Kuisisioner

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuisisioner yang tersebar	66
2.	Jumlah kuisisioner yang kembali	66
3.	Jumlah kuisisioner yang tidak apat diolah	6
4.	Jumlah kuisisioner yang dapat diolah	60
	Responden Rate	90,90%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

B. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian.

Dalam melakukan analisis menggunakan teknik regresi berganda. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data yang baik adalah data yang pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov test*.

Tabel 5. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.00E-7
	Std. Deviation	2.787753821
	Most Extreme Absolute Differences	.079
	Positive	.079
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.608
Asymp. Sig. (2-tailed)		.853

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0,853 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol.

Menurut Ghozali (2005:92), pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value*. Batas dari *tolerance value* adalah $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$. Jika *tolerance value* dibawah $0,10$ atau nilai VIF diatas 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolenearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tekanan	.962	1.039
	Kesempatan	.400	2.501
	Rasionalisasi	.401	2.496

a. Variabel dependen : Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat variabel Tekanan (X_1) dengan nilai (VIF) 1,039 dan *tolerance* $> 0,962$, variabel Kesempatan (X_2) memiliki nilai (VIF) 2,501 dan *tolerance* $> 0,400$, dan variabel rasionalisasi (X_3) memiliki nilai VIF 2,496 dan *tolerance* $> 0,401$. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini bebas multikolenearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2,449	1,248		1,962	,055
Tekanan	,018	,039	,062	,463	,646
Kesempatan	,009	,079	,024	,114	,909
Rasionalisasi	-,091	,097	-,196	-,943	,350

Sumber : Pengolahan Data Primer 2017

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level $\text{sig} > 0,05$ yaitu $0,646 > 0,05$ untuk variabel tekanan, $0,909 > 0,05$ untuk variabel kesempatan, dan $0,350 > 0,05$ untuk variabel rasionalisasi. Sehingga

penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

C. Teknik Analisis Data

a. Distribusi Variabel Tindakan Kecurangan (Y)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variable dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan nomor 2, yaitu 82,67 % dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Narapidana Tindak Pidana Korupsi dominan Seseorang memberikan hadiah untuk memanfaatkan jabatan yang diemban. Sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan nomor 4, yaitu sebesar 41,33% dengan kategori kurang baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel tindakan kecurangan (*fraud*) adalah sebesar 62,33 % dengan kategori cukup baik.

b. Distribusi Variabel Tekanan (X1)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan nomor 4, yaitu 67,33 % dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Narapidana Tindak Pidana Korupsi dominan mengalami kerugian keuangan. Sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan nomor 8, yaitu sebesar 25,00% dengan kategori tidak baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel tekanan adalah sebesar 48,39% dengan kategori kurang baik.

c. Distribusi Variabel Kesempatan (X2)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel dapat dilihat bahwa

tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan nomor 5, yaitu 67,33 % dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa tempat Narapidana Tindak Pidana Korupsi bekerja tidak memiliki aturan yang tegas. Sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan nomor 1, yaitu sebesar 60,67% dengan kategori kurang baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel kesempatan adalah sebesar 63,93% dengan cukup baik.

d. Distribusi Variabel Rasionalisasi (X3)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel rasionalisasi di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden tertinggi berada pada pernyataan nomor 1, yaitu 83,4% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dominan Narapidana Tindak Pidana Korupsi manajemen di tempat bekerja tidak terlalu memandang nilai etis dari suatu tindakan. Sedangkan untuk tingkat capaian responden terendah berada pada pernyataan nomor 3, yaitu sebesar 48,00% dengan kategori kurang baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden pada variabel rasionalisasi adalah sebesar 71,9% dengan kategori baik.

2. Adjusted R²

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R² sudah disesuaikan

dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Uji *Adjusted R²*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.619	.559	2.861

a. Predictors: (Constant), Rasionalisasi, Tekanan, Kesempatan

b. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2017

Dari tampilan tabel di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,559. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi adalah sebesar 55,9%, sedangkan 44,1% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows*. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program *SPSS* tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)					
Tekanan	,029	1,863		,015	,988
Kesempatan	,088	,058	,128	1,523	,133
Rasionalisasi	,359	,118	,398	3,053	,003
	,444	,144	,401	3,075	,003

Sumber : Pengolahan data primer tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:
 $Y = 0,029 + 0,088 X_1 + 0,359 X_2 + 0,444 X_3 + e$

Keterangan:

- Y = Tindakan Kecurangan (*Fraud*)
- X1 = Tekanan
- X2 = Kesempatan
- X3 = Rasionalisasi

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 0,029 ini mengidentifikasi bahwa jika variabel independen yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi adalah 0 maka nilai tindakan kecurangan (*fraud*) adalah sebesar konstanta 0,029.
- b) Koefisien tekanan sebesar 0,088 ini mengidentifikasi setiap peningkatan tekanan sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tindakan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,088 dengan asumsi variabel lain konstan.

- c) Koefisien kesempatan sebesar 0,359 mengidentifikasi setiap peningkatan kesempatan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tindakan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,359 dengan asumsi variabel lain konstan.
- d) Koefisien rasionalisasi sebesar 0,444 mengidentifikasi setiap peningkatan rasionalisasi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan tindakan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,444 dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Uji F

Dari hasil analisis data yang diperoleh tentang tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap peningkatan tindakan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Untuk menguji hipotesis ini, maka dilakukan uji F dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pada level signifikansi 0,05 besar F_{tabel} untuk $df=57$ adalah 4,01. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 30.364$ dan signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $30.364 > 4,01$ (sig. $0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis data yang diperoleh tentang tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap peningkatan tindakan kecurangan (*fraud*), uji F dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 10. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	745,732	3	248,577	30,364	,000 ^b
Residual	458,452	56	8,187		
Total	1240,183	59			

Sumber: Pengolahan data primer tahun 2017

5. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t statistik (t-test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n - k = 60 - 3 = 57$ adalah 1,672 berdasarkan hasil analisis pada tabel 17 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,672. Untuk variabel tekanan (X_1) nilai t_{hitung} adalah 1,523 dan nilai sig adalah 0,133. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,523 < 1,672$ atau nilai signifikansi $0,133 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,088. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan tekanan (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) **ditolak**.

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,672. Untuk variabel kesempatan (X_2) nilai t_{hitung} adalah 3,053 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,053 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,359. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kesempatan (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

c. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,672. Untuk variabel rasionalisasi (X_3) nilai t_{hitung} adalah 3,075 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,075 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,444. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan rasionalisasi (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) **diterima**.

4. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 55,9% terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Tetapi secara parsial hanya kesempatan dan rasionalisasi saja yang

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat dibuktikan dari tabel distribusi frekuensi variabel maupun dari pengolahan data menggunakan spss. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut hasil hubungan masing-masing variabel:

1. Pengaruh Tekanan terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hubungan antara tekanan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*), di mana nilai hubungannya sebesar 0,133. Hasil ini memberikan gambaran bahwa hubungan antara kedua variabel adalah searah dan lemah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Creassey (1953) di mana, semakin tinggi tekanan yang dirasakan seseorang seperti tekanan ekonomi, maka keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan juga semakin tinggi. Hasil penelitian Binde (2016) seseorang yang sudah memiliki kecanduan judi susah untuk dihentikan. Ketika mereka kalah, maka mereka termotivasi untuk ikut judi lagi untuk menutupi hasil kekalahan yang telah merugikan mereka. Ketika sumber pendanaan milik pribadi telah habis, maka mereka akan termotivasi untuk menggunakan uang kantor yang dibawah kendali mereka. Penelitian Abdullahi dan Mansor (2015), Wells (2001) dan Murdock (2008) juga membuktikan bahwa tekanan memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Namun demikian hubungan antara kedua variabel ini lemah sehingga tidak dapat membuktikan tekanan berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dahlia, dkk (2013). Dimana, secara

parsial faktor tekanan tidak berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi. Di mana hasil penelitian menunjukkan hubungan yang searah namun lemah, sehingga tidak dapat membuktikan faktor tekanan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar koruptor melakukan tindakan kecurangan bukan karena adanya tekanan ekonomi ataupun kesempatan melainkan pada umumnya para koruptor menganggap apa yang dilakukannya adalah hal yang umum yang biasa dilakukan dan tidak melanggar hukum dan kemanusiaan sehingga kecurangan kerap terjadi. Dellaportas (2012) juga menemukan bahwa faktor tekanan tidak terlalu mendominasi di dalam tindakan *fraud*.

2. Pengaruh Kesempatan terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kesempatan berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) yang pernah dilakukan oleh narapidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, yang artinya dominan kesempatan memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Creassey, bahwa pelaku kecurangan selalu memiliki pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut agar tindakan itu tidak dapat terdeteksi. Dellaportas (2012) menemukan dalam penelitiannya bahwa kesempatan merupakan faktor yang mendominasi mempengaruhi ketika seseorang melakukan *fraud*, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku mengandalkan posisi mereka sebagai akuntan profesional untuk menipu oranglain ketika mereka dihadapkan dengan krisis khusus yang mengakibatkan perilaku kriminal.

Penelitian Brennan dan McGrath (2007), Binde (2016), Istianah, dkk (2014), Fazli, dkk (2014) dan Greenlee, dkk (2006) juga membuktikan bahwa kesempatan memiliki andil dalam tindakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau *fraud*. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku kecurangan yang pada awalnya tidak memiliki niat sekalipun untuk melakukan kecurangan, namun pelaku mengetahui bahwa ia mempunyai pengetahuan akan kelemahan sistem pengendalian di tempat bekerja menjadikannya sebagai kesempatan yang besar untuk melakukan kecurangan, sehingga hal ini memotivasi pelaku untuk melakukan kecurangan.

3. Pengaruh Rasionalisasi terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) yang pernah dilakukan oleh narapidana korupsi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, yang artinya dominan rasionalisasi memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) tersebut. Hasil ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Creassey, di mana salah satu faktor pelaku melakukan kecurangan yaitu dengan mencari-cari pembenaran atas tindakannya. Pelaku kecurangan pada umumnya menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan tindakan yang benar dan memang hak nya, sehingga apa yang ia lakukan bukanlah suatu tindakan kecurangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dellaportas (2012) menyebutkan bahwa, sebuah khas kejahatan kerah putih adalah kurangnya perasaan atau ketidakpedulian oleh pelaku yang berasal dari serangkaian alasan atau rasionalisasi untuk

membebaskan diri dari rasa bersalah yang timbul dari perilaku menyimpang. Penelitian Binde (2016), Murdock (2008), Greenlee, dkk (2006) juga membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Jadi, dapat dikatakan bahwa rasionalisasi merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Di mana pelaku *fraud* selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya.

4. Pengaruh Variabel Lain terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*)

Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 55,9% faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Ini berarti, masih ada sebesar 44,1% lagi variabel-variabel yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) yang tidak terungkap pada hasil penelitian ini.

Wolfe dan Hermanson pada penelitiannya tahun 2004, mengemukakan teori baru yakni *Fraud Diamond Theory*. Mereka memodifikasi *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) dengan menambahkan elemen *capability*/kapabilitas sebagai salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*. Wolfe dan Hermanson mengungkapkan meskipun seseorang memiliki tekanan, kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan rasionalisasi atas tindakannya tersebut, ia tidak akan

mampu menyembunyikan tindakan *fraud*-nya apabila ia tidak memiliki elemen yang keempat, yakni kapabilitas. Sedangkan pada penelitian Istianah, dkk (2014) mengemukakan bahwa aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tindakan kecurangan korupsi.

5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada narapidana tindak pidana korupsi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara bersama-sama ketiga variabel yang terkait dengan motif kecurangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Tetapi secara parsial, hanya faktor kesempatan dan rasionalisasi yang berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar dikembangkan dengan menambahkan variabel penelitian seperti kapabilitas (*capability*) sesuai dengan teori *Fraud Diamonds*, lemahnya pengendalian internal, perilaku tidak etis, aspek peraturan perundang-undangan dan aspek pengawasan. Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel agar hasil dapat digeneralisasi dan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R dan Mansor, N. 2015. Concomitant Debacle of Fraud Incidences in the Nigeria Public Sector: Understanding the power of Fraud Triangle Theory. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Science*.
- Abdullahi, R., dan Mansor, N. 2015. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Science*.
- Aghghaleh, Sabnam Fazhli, dkk. 2014. Fraud Risk Factors of Fraud Triangle and the Likelihood of Fraud Occurrence: Evidence from Malaysia. *Information Management and Business Review* Vol. 6, No. 1, pp. 1-7.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2002. "Statement of Auditing Standard No. 99".
- Anand, V., Blake, E. A., & Joshi, M. (2004). Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption. *Academy of Management Executive*, 18 (2), 39–53.
- Anwar, Syamsul. 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Ardianawati, Wahyu & Dyah Retna Puspita. 2012. *Demoralisasi Demokrasi*. (Fenomena Korupsi dan *Red Tape* di Sektor Publik).
- Arens, Alvin A, Randal J Elder, Mark S Beasley. 2008. *Auditing and*

- Assurance Services*. Diterjemahkan oleh Herman Wibowo. Jakarta : Erlangga.
- Arikunto, Suharimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Association of Certified Public Accountants (ACFE). 2014. "Fraud Examiners Manual (International Edition)". New York.
- Binde, Per. 2016. Gambling-related Embezzlement in The Workplace: A Qualitative Study. *International Gambling Studies*, 2016.
- Black's Law Dictionary. 1990. 6th Edition. St. Paul, MN: West Publishing Co.
- Brennan, Niamh M dan McGrath, Mary. 2007. Financial statement fraud : some lessons from US and European case studies. *Australian Accounting Review*, 17 (42): 49-61.
- COSO. 2004. *Enterprise risk management – integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations*.
- Dahlia, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Proceedings of Population and Human Resources Development*, Vol. 2, April 2013.
- Dellaportas, Steven. 2012. Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity, and the fraud triangle. *Accounting Forum*.
- Duffield, D. & Grabosky, P. 2001. The Psychology of Fraud. Australian Institute of Criminology. *CTTMA Newsletter Volume IV Issued I*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Greenlee, Janet, dkk. 2006. An Investigation of Fraud in Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents. *Working Paper No. 35*.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonomitrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
- Istianah, Ida Farida, dan Krisdiyawati. 2014. Faktor-faktor yang memotivasi tindakan korupsi pada anggaran di Kab. Tegal.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Kunda, Z. 1990. The case for motivated reasoning. *Psychology Bulletin*, 108(3), 480-498.
- Lokanan, Mark, E. 2015. Challenges to The Fraud Triangle: Questions on its Usefulness. *Accounting Forum*. ACCFOR-315, Pages 24.
- Murdock, Hernan. 2008. The three dimensions of fraud: auditors should understand the needs, opportunities, and justifications that lead individuals to commit fraudulent acts. *Internal Auditor*. 65.4 (Aug. 2008): p81.
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional, (terj.) Masri Maris*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ramamoorti, S. 2008. The psychology and sociology of fraud: intregrating the behavior sciences component into fraud and forensic accounting curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521-533.
- Rossouw, G. J., Mulder, B., & Barkhuysen, B. 2000. Defining and understanding fraud: A South

- African case study. *Business Ethics Quarterly*, 10(4), 885–895.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistika Multivariat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi. 2012. *Mengapa Seseorang Melakukan Korupsi?*. Palembang: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan.
- Tuanakotta, Theodorus. 2012. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- U.S. Congress. 2002. *Sarbanes-Oxley Act of*, H.R. 3763.
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahyudi, Isa & Sopanah. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Penapatan Belanja Daerah (APBD) di Malang Raya.
- Wells, Joseph T. 2001. Why Employees Commit Fraud :It’s either greed or need. *Journal of Accountancy*; New York 191.2 (Feb 2001): 89-91.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Wolfe, D., & Hermanson, D. R. 2004. The Fraud Diamond: Considering For Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74 (12), 38-42.
- Zaenuddin & Chrisna Suhendi. 2015. Analisis survey faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah.
- Zimelman, Mark, dkk. 2014. *“Akuntansi Forensik”*. Jakarta: Salemba Empat.

Internet :

www.adb.org
www.antikorupsi.org
www.liputan6.com
www.nasional.kompas.com
www.news.detik.com
www.oxforddictionaries.com
www.riauonline.co.id
www.smslap.ditjenpas.go.id
www.ti.co.id